



# **Strategi Partai Gerindra dalam Memenangkan Dahlan Hasan dan Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal**

## ***Gerindra Party Strategy in Winning Dahlan Hasan and Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution As Regent and Deputy Regent in Mandailing Natal***

**Muhammad Sukri<sup>1)</sup>\*, Rudi Salam Sinaga<sup>2)</sup> & M. Aswin Hasibuan<sup>2)</sup>**

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area, Indonesia

2) Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatear Utara, Indonesia

### **Abstrak**

Pilkada merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Sehingga Pilkada harus diselenggarakan secara berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Oleh karena itu strategi sangat dibutuhkan dalam memenangkan suatu kontestasi politik. Tujuan penelitian untuk mengetahui Bagaimana strategi Partai Gerindra dalam memenangkan Dahlan Hasan Nasution dan Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal serta hambatan yang dialami waktu melakukan kampanye. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Serta teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Henry Mintzberg, James Brian yang meliputi, strategi sebagai plan, ploy, pattern, position, perspective. melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, akademisi, kepala desa, ormas serta berkunjung setiap ada keramaian di masyarakat adalah poin utama yang dilakukan. Dengan tersistemnya kampanye tersebut membuat masyarakat yakin bahwa pasangan tersebut merupakan pasangan yang layak dipilih untuk menjadi pemimpin di daerahnya sehingga pasangan tersebut mampu memperoleh 56,67% suara.

**Kata Kunci:** Strategi, Kemenangan, Partai Politik

### **Abstract**

*Pilkada is a means to realize the sovereignty of the people in government, therefore Pilkada must be held in a quality manner with the broadest participation of the people. The purpose of the study was to find out how the Gerindra Party's strategy in winning Dahlan Hasan Nasution & Ja'far Sukhairi Nasution as the Regent and Deputy Regent of Mandailing Natal District as well as the obstacles experienced during the campaign. The type of research used in this study is a qualitative research method. And the theory used in this research is Henry Mintzberg's theory, James Brian which includes, strategies as plan, ploy, pattern, position, perspective. Approaching community leaders, academics, village heads, mass organizations and visiting every time there is a crowd in the community are the main points that are carried out. with the systemic campaign, the community is convinced that the couple is a worthy partner to be chosen to be the leader in their area so that the pair is able to obtain 56.67% of the votes.*

**Keywords:** Strategy, Victory, Polotocal Party

**How to Cite:** Sukri, Muhammad. Sinaga, Rudi Salam. & Hasibuan, M. Aswin. (2020). Strategi Partai Gerindra dalam Memenangkan Dahlan Hasan dan Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1) 2020: 53-59,

\*E-mail: muhammadsukri@gmail.com



## PENDAHULUAN

Suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi maupun yang sedang membangun proses demokratisasi, partai politik menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Melalui partai politik rakyat berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka dan siapa akan menjadi pemimpin yang menentukan kebijakan umum (*public policy*) (Cangara, 2014). Selain itu juga pemilihan umum merupakan salah satu indikator penting bagi tegaknya suatu konsep demokrasi pada suatu Negara (Sinaga, 2011). Oleh karena itu, pemilu harus diselenggarakan secara berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas – luasnya dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Partisipasi rakyat dalam pemilu dapat diwujudkan dengan cara menjadi bagian dari instrumen pemilu yang ada.

Salah satu daerah di Indonesia yang melakukan PILKADA serentak pada tanggal 9 Desember 2015 adalah Mandailing Natal. Dalam pelaksanaan kompetisi untuk meraih jabatan publik seperti dipemilihan umum (pemilu), kampanye politik tidak selalu berjalan datar tanpa dinamika didalamnya, baik bagi kandidat maupun kompetitor lainnya. Segala usaha, dan tindakan yang telah dirancang ataupun terbentuk secara spontanitas selalu memiliki efek tertentu dalam kepentingan tercapainya misi meraih kemenangan. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana strategi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dalam memenangkan Dahlan Hasan Nasution dan MuhammadJa'far Sukhairi Nasution sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal.

Konsep strategi tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah organisasi untuk mencapai suatu tujuan dimasa depan (Husna, dkk., 2019). Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Morrissey (1995) mendefinisikan strategi adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar misinya tercapai dan sebagai daya dorong yang akan membantu perusahaan dalam menentukan produk, jasa dan pasarnya dimasa depan dalam menjalankan aktifitas operasional setiap hari diperusahaan, para pemimpin dan manajer puncak selalu merasa bingung dalam memilih dan menentukan strategi yang tepat karena keadaan yang terus menerus berubah (dalam Manullang, 2012).

Henry Mintzberg, James Brian Quinn, dan John Voyer mendefinisikan strategi sebagai 5p, yaitu: Strategi sebagai Perspektif, Strategi sebagai Posisi, Strategi sebagai Perencanaan, Strategi sebagai Pola, Strategi sebagai taktik, Strategi sebagai Posisi, dan strategi sebagai Perspektif, dimana strategi dalam membentuk misi, misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai Posisi, dimana dicari pilihan untuk bersaing. Sebagai Perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi perusahaan. Sebagai pola kegiatan, dimana dalam strategi dibentuk suatu pola yaitu umpan balik dan penyesuaian. Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. menurut Kotlar

dan Roberto (1989), kampanye adalah sebuah upaya yang diorganisasi oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Kampanye politik adalah peristiwa yang bisa didramatisasi (menegangkan). Oleh karena itu Richard A. Joslyn dalam bukunya Swanson (1990) melukiskan kampanye politik tidak ada bedanya dengan sebuah adegan drama yang dipentaskan oleh para aktor-aktor politik. Dalam praktik, tidak sedikit kegiatan kampanye yang dilakukan menemui kegagalan, tetapi banyak juga berhasil karena dirancang dengan baik sesuai oleh seorang ahli yang berperan sebagai *spin doctor* (Cangara, 2014; Nurfitriani, Hamrun, dan Ahmad T., 2017).

Efektivitas kampanye hanya bisa diketahui dengan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni evaluasi program dan evaluasi manajemen. Evaluasi program bisa disebut dengan evaluasi summatif (*summative evaluation*) untuk melihat sejauh mana tujuan akhir dari suatu kegiatan dan untuk melakukan modifikasi program. Sedangkan Evaluasi Manajemen biasanya disebut evaluasi formatif (*formative evaluation*). Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2006 pasal 1, definisi Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 pasal 2 dinyatakan bahwa syarat pembentukan Partai Politik di Indonesia adalah sebagai berikut: Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah; pendiri dan pembentuk Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 30% keterwakilan perempuan; Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta pengurusan Partai Politik tingkat Pusat; Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3); Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan).

Partai Politik didirikan bukan tanpa tujuan, adapun tujuan Partai Politik itu didirikan ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum didirikannya partai politik adalah Mewujudkan cita - cita Nasional Bangsa Indonesia, Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun tujuan khusus didirikannya partai adalah Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat, Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan Membangun etika dan budaya Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Miriam Budiarjo dalam bukunya Mustaqim politik lokal polarisasi kekuatan partai politik lokal (dalam Mustaqim, 2014; Kadir, A., 2013), diantaranya: Sebagai sarana komunikasi Politik; Sebagai Sarana sosialisasi Politik; Sebagai sarana rekrutmen politik; Sebagai sarana pengatur konflik.

Pemilu merupakan salah satu bentuk instrumen pelembagaan periodik dalam menerjemahkan demokrasi, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan. Pemilu menjadi medium mengonversi kekuatan politik masyarakat sipil (partai politik) ke dalam suprastruktur pemerintahan Negara. Dalam bukunya (Firdaus, 2015) yang berjudul Pemerintahan Demokrasi dan sistem kepartaian ada dua arus perdebatan konsep perwakilan yang senantiasa menjadi landasan dalam penentuan sistem pemilu, dan secara tidak langsung berimplikasi terhadap pelembagaan sistem kepartaian. Diantara konsep tersebut adalah yang pertama konsep perwakilan proporsional (*Proportional representation*) dan yang kedua konsep perwakilan distrik (*district representation*).

Konsep sistem pemilu proporsional, dimana distribusi kursi diantara partai politik peserta pemilu dibagi berdasarkan proporsi perolehan suara secara nasional menurut jumlah bilangan pembagi tertentu. Sistem pemilu proporsional cenderung memperbesar jumlah partai efektif yang berdampak pada terbentuknya sistem multipartai. Sedangkan Konsep Sistem Pemilu distrik, Salah satu sistem pemilu yang dalam banyak segi cenderung mengendalikan jumlah partai efektif. Hal tersebut terjadi karena suatu negara dibagi dalam beberapa distrik yang mana pembagian kursi, didasarkan pada satu distrik, dimana satu orang wakil dengan mekanisme suara terbanyak (*plurality system*) atau *the first past the post*. Artinya, pemenangan suara terbanyak pertama mewakili distriknya. Akibatnya, sistem pemilu distrik dapat menimbulkan disproporsionalitas yang tinggi.

Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Dalam penyelenggaraan Pilkada telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah, diantaranya sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah; Undang-Undang Nomor 32 tentang penjelasan pemerintah daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 3 tentang PERPU Nomor 3 tahun 2005; Dengan keluarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang pemerintah telah resmi membekukan bahwa *recruitment* kepala daerah dilakukan dengan cara pemilihan kepala daerah secara langsung dan dilaksanakan serentak. Pilkada merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat (Mz Hollyson & Sundari, 2015). Setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya adalah Gubernur, Bupati dan Walikota.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian dilakukan dimulai dari minggu

ke 4 bulan februari 2018 sampai dengan akhir Maret 2018. Informan Penelitian terdiri atas informan kunci (Ketua DPC Partai Gerindra kabupaten Mandailing Natal), informan utama (yaitu Konsultan Politik dalam pemenangan Dahlan Hasan Nasution dan Muhammad Ja'far Sukhairi), dan Informan tambahan (Tim sukses dalam pemenangan Dahlan Hasan Nasution dan Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis implementasi dari strategi pemenangan politik yang dilakukan pada pilbub di Mandailing Natal tahun 2015, analisis yang dilakukan terhadap usaha yg dilakukan Oleh Dpc Partai Gerindra agar calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 dapat dikenali oleh warga Kabupaten Mandailing Natal atau bisa disebut pengenalan produk yang ditawarkan kepada masyarakat. kemudian strategi yang digunakan agar pasangan Dahlan Hasan & Ja'far Sukhairi dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat Mandailing Natal atau kepada para pemilih. Adapun langkah-langkah Strategi yang digunakan Dpc Partai Gerindra dalam pemenangan ini adalah: 1. Plan (rencana), 2. Ploy (Taktik), 3. Pattern (pola), 4. Position (posisi), 5. Perspective (perspektif).

Dalam wawancara bersama Bapak Erwin Efendi Lubis sebagai ketua Dpc Gerindra Mandiling Natal di kantor Dpc Geindra menyatakan perencanaan suatu kegiatan sangatlah penting. Karena perencanaan akan memberikan efek, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan. Suatu perencanaan merupakan langkah awal yang dilaksanakan secara sadar, matang dan terus menerus untuk memilih yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada bagi pencapaian. Dalam merencanakan suatu kemenangan dalam pemilu terkhususnya pada pemilihan kepala daerah partai politik tidak akan mampu mempromosikan atau memenangkan kandidatnya dalam pilkada tanpa meminta bantuan dari orang-orang untuk membantu dalam meyakinkan masyarakat.

Dalam teorinya Mintzbergstrategi taktik (Ploy) merupakan strategi untuk mendapatkan yang terbaik dari pesaing, dengan merencanakan untuk menghalangi calon lain supaya tidak dapat mempengaruhi masyarakat yang sudah diperkirakan sebagai basis. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan kunci, pelaksanaan suatu program kampanye harus berkaitan erat dengan program dari strategi utama, tujuan utama, tujuan kampanye, ketika akan mengembangkan taktik pelaksanaan kampanye tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor kekuatan, kreativitas atau kekuatan tim kampanye. Strategi sebagai pola merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajer/pimpinan organisasi untuk mendapatkan tujuan. Seperti yang diungkapkan Bapak Erwin Efendi Lubis berkedudukan di kantor Dpc Gerindra menyatakan, Didalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan partai Gerindra untuk kemenangan paslon yang telah kita usung tentunya kita sudah melakukan survey terlebih dahulu oleh tim yang sudah disusun.

Strategi sebagai posisi merupakan cara untuk menentukan strategi bagaimana anda memutuskan untuk memposisikan diri di pasar. Dari hasil wawancara terhadap informan kunci, diambil kesimpulan bahwa daerah kelahir adalah salah satu bagian yang dapat diambil dalam penyusunan Strategi. partai politik merupakan bagian dari pemasaran politik pada dasarnya strategi pemasaran berhubungan dengan konstituen

pesaing dan organisasi. Setiap strategi berfokus pada cara-cara dimana organisasi dapat membedakan dirinya dari pesaing-pesaing secara efektif dengan mengarahkan sumberdaya yang dimilikinya guna memberikan nilai lebih, guna untuk penetapan pemilihan dari sekian kemungkinan pendukung yang sudah dipetakan. Strategi perspektif merupakan strategi yang sangat bergantung pada budaya, seperti pola perilaku dapat muncul sebagai strategi, pola pikir akan membentuk perspektif organisasi, dan hal-hal yang ia mampu melakukannya dengan baik. Kampanye pada saat Pilkada merupakan kehilangan partai politik mengemas partainya dalam promo besar-besaran untuk menarik simpatisan rakyat. Pada saat sekarang ini rakyat sebenarnya kini mulai kritis, rakyat sudah mengerti ketika partai politik membagikan kaos, sembako, door prize, atau bahkan uang selama kampanye maka itu semua dipahami rakyat sebagai sebuah pesta yang datang setiap adanya pemilu atau pilkada.

Dalam penyusunan strategi kemenangan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mandailing Natal. DPC Partai Gerindra, Tim sukses serta partai pengusung lainnya melakukan analisis Swot (strengths, Weaknesses, Opportunities, threats). Atau lebih sering disebut sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman guna untuk menganalisis gejala politik yang terjadi. Selain dari pada itu melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Guna melihat sejauh mana peluang keberhasilan pasangan calon dalam meraih suara.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian maka, kesimpulan DPC partai Gerindra Mandailing Natal melakukan strategi kampanye untuk memenangkan pasangan Dahlah Hasan Nasution & Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal dilakukan dengan berbagai cara. Melakukan pendekatan-pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, serta akademisi untuk memperkuat kampanye-kampanye yang dilakukan oleh partai Gerindra dan tim sukses. Melakukan kampanye dalam bentuk tim/kerjasama antara pengurus partai dengan tim sukses, dimana tim yang dibentuk itu adalah mereka orang-orang yang memiliki loyalitasnya terhadap partai, utamanya mereka yang termasuk dalam organisasi sayap partai Gerindra. Melakukan komunikasi yang baik terhadap masyarakat, contoh komunikasi yang dilakukan partai Gerindra seperti ketika ada kemalangan kader partai menyempatkan hadir untuk berbela sengkawa sekaligus demi mendapatkan simpati dari masyarakat, serta keramaian-keramaian masyarakat lainnya. Melakukan kampanye sesuai dengan kebudayaan di setiap masyarakat. Dengan tujuan supaya masyarakat lebih tertarik dan tidak bosan akan hadirnya suatu calon di tengah-tengah masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Cangara, H. (2014). *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Firdaus. (2015). *Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*. Bandung: Yrama Widya.
- Husna, A. Manan, F. & Herdiansah, A.G. (2019): Fungsi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai GERINDRA pada Pemilihan Umum 2019 Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (1): 65-73
- Kadir, A., (2013). Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2009, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 1 (1): 65-75
- Manullang, M. (2012). *Manajemen Strategi*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

- Mustaqim. (2014). Politik Lokal Polarisasi Partai Politik Lokal DI Kabupaten Aceh Timur. Medan: LKISPOL-Press.
- Mz Hollyson, R., & Sundari, S. (2015). Pilkada. Jakarta: Pilkada Serentak.
- Nomor. 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- Nomor. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota
- Nurfitriani, Hamrun, dan Ahmad T., (2017). Pemasaran Politik Bupati Bima Terpilih pada Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2015. *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA) UMA*, 5 (2): 71-78
- Sinaga, R. S. (2011). Pemasaran Politik Teori dan Aplikasi Pemasaran Politik Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Medan: FISIP USU Press.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik